

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini banyak pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, yang dilakukan dengan berbagai cara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Didalam dunia pemerintahan adalah salah satu contoh tempat praktik kecurangan yang sangat mudah dilakukan tanpa diketahui oleh pihak lain, hal ini dipengaruhi oleh adanya kekuasaan, kebutuhan individu, dan peluang yang mendukung terjadinya praktik kecurangan.

Salah satu praktik kecurangan yang terjadi adalah Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Salah satu contoh kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintah dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kecenderungan kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintah tetapi juga bisa terjadi di sektor swasta. Pada sektor swasta kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk yang serupa yaitu dalam pembelanjaan sumber dana kurang tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Wilopo, 2006)

Selama ini banyak artikel ilmiah dan berita yang membahas mengenai adanya indikasi KKA pada suatu instansi swasta maupun pemerintah yang dilakukan oleh karyawan/pegawainya. Sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya penyimpangan tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi. Upaya penegakan hukum terhadap tindakan *fraud* selama ini kurang

tegas dan kurang membawa hasil yang seperti di inginkan. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan, masih tidak dapat menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Sumenep, diantaranya adalah pada tahun 2010 terungkap dua mantan pejabat Sumenep yang menjadi tersangka atas pengadaan dua unit kapal bekas yang merugikan negara sebesar Rp.742.405.540,00. Kasus ini menyeret nama mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (KPKD) Kab. Sumenep, Moh. Toha dan Ketua Panitia Lelang Pengadaan Kapal, Sungkana. Pada tahun 2002 KPKD melakukan pengadaan dua unit kapal bekas senilai Rp14,5M. Akan tetapi dana sebesar itu tidak terserap semuanya, karena dana yang digunakan hanya RP 13.999.870.000,00. (Kompas.com)

Kasus selanjutnya adalah kasus pengadaan lahan SMA Negeri Batuan Kabupaten Sumenep. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep menduga telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan SMA Negeri Batuan baik dalam proses maupun harga. Berdasarkan informasi, diduga terjadi *mark up* harga dalam pengadaan lahan tersebut. Pembebasan lahan SMA Negeri Batuan dilaporkan menelan dana lebih dari Rp 1,7 Milyar, dengan rincian 10 harga tanah per meter sebesar Rp 175.000,- sedangkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Batuan hanya Rp. 50.000,- per meter. (beritajatim.com:17 Maret 2014)

Kasus lain yang terjadi di Kabupaten Sumenep adalah hasil audit BPK RI tertanggal 30 april 2014 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa terdapat 726 rekening bank milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga bodong atau tanpa penetapan surat keputusan bupati setempat. Belasan mahasiswa yang tergabung

dalam Kaukus Mahasiswa Sumenep (KMS) berdemonstrasi atas kasus tersebut didepan Kantor Bupati Sumenep untuk meminta pejabat sekretaris daerah (sekda) setempat bertanggung jawab atas munculnya rekening bodong tersebut.

Semakin maraknya kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi dikalangan pemerintah menjadi tanggung jawab yang lebih besar kepada lembaga-lembaga sektor publik dari masyarakat untuk dilakukan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab organisasi publik kepada masyarakat. Pemerintah harus tegas dalam melaksanakan tugasnya agar penggunaan sumber daya organisasi bisa optimal dengan suatu perencanaan yang cermat agar seluruh program dan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), semakin maraknya kecenderungan kecurangan akuntansi akan menghambat tercapainya tujuan pemerintahan, yaitu (a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, (b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat, (c) membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan terjadinya kecurangan akuntansi dilihat dari : (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan

tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Cressey dalam Tuanakotta (2010 : 208) yang sering juga disebut teori *triangle*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* meliputi tekanan/motiv, faktor ini mendorong individu untuk melakukan tindak kecurangan dikarenakan adanya: kegagalan pada individu, kegagalan bisnis, keterpurukan seseorang, iri / dengki, serta kekesalan pada rekan kerjanya. Sudut kedua dari *fraud triangle* adalah *opportunity* (peluang), merupakan sudut pandang dari kedua *fraud triangle*. Cressey dalam Tuanakotta (2010:211) berpendapat bahwa terdapat dua komponen dari persepsi tentang peluang. Pertama adalah *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Persepsi yang kedua adalah teknik skill atau keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* atau mencari pembenaran diri sebelum melakukan tindakan *fraud*. Ini berarti bahwa sebenarnya pelaku *fraud* tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan termasuk suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum.

Pegawai ataupun karyawan melakukan kecurangan akuntansi pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari diri sendiri yang disebut dengan individual dan kondisi yang berasal dari luar yang disebut dengan situasional. Kondisi yang berasal dari diri sendiri salah satu contohnya adalah moralitas. Moralitas merupakan sikap seseorang yang timbul dari hati lahiriah. Moralitas ada apabila seseorang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan mencari sebuah keuntungan. Seseorang yang mempunyai moralitas yang tinggi akan berfikir

kembali untuk melakukan sebuah kecurangan. Salah satu teori yang sering digunakan dalam perkembangan moral adalah model Kohlberg. Kohlberg (1969) menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tiga tahap, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*.

Aranta (2013) mengatakan, bahwa selain dipengaruhi oleh kondisi yang berasal dari diri sendiri pimpinan juga berpengaruh dalam tindakan kecurangan di suatu instansi. Oleh sebab itu pimpinan harus menerapkan moralitas yang baik kepada staf, dengan memberi contoh yang baik kepada para staf tentang bagaimana cara bersikap dalam menjalankan tugas dalam sebuah instansi, menjunjung tinggi kejujuran dan mencintai pekerjaan, serta menghormati pimpinan dan saling menghargai sesama staf. Kecurangan juga dapat dihindari dengan selalu bersikap terbuka satu sama lain dalam batas-batas kerahasiaan satu sama lain dalam batas-batas kerahasiaan instansi. Jika moralitas terjaga dengan baik, maka kecurangan pun dapat dihindari.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi terjadinya adalah *gender*, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang tingkat moralitas dan cara pandang yang dimiliki terhadap uang dan cara mengambil suatu keputusan etis. Menurut Tang (2000) menemukan bahwa karyawan laki-laki lebih mementingkan uang dibandingkan perempuan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih sering berperilaku lebih etis dibandingkan dengan laki-laki. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan sosialisasi yang beragam antara laki-laki dan perempuan, laki-laki diajarkan untuk menekankan persaingan sedangkan perempuan diajarkan untuk menekankan hubungan sosial (Beutell & Brenner, 1986; Lever, 1978) dalam Charismawati (2011).

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah (*money ethics*) etika seseorang terhadap uang. Banyak orang yang sadar ataupun tidak sadar mengabdikan hidupnya untuk mencari uang. Terkadang seseorang untuk mendapatkan uang yang lebih besar dapat menggunakan berbagai cara, untuk mendapatkan uang yang lebih. Uang memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif dari uang yaitu dapat menciptakan rasa iri yang lahir dari ketidakadilan, ketika orang yang memiliki uang banyak mendapatkan kesempatan lebih banyak, dibandingkan dengan orang yang lebih sedikit mendapatkan uang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Chiu (2002) hasil dari penelitiannya adalah bahwa Etika Uang (*Money Ethic*) ditemukan secara langsung berkaitan dengan perilaku yang tidak etis dan tidak langsung terkait dengan perilaku tidak etis melalui kepuasan terhadap gaji. Hal ini disimpulkan dari yang melakukan penelitian pada karyawan profesional di Hongkong. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uang merupakan salah satu sumber yang mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan serta masalah – masalah yang terjadi di lingkup pemerintah saat ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus – kasus *fraud* yang dilakukan pegawai pada instansi pemerintah pada saat ini. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) dan Suwadi (2011) yang membahas tentang kecurangan pajak dan kecurangan akuntansi. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Basri (2014) menggunakan obyek wajib pajak orang pribadi sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dilingkungan instansi

pemerintah. Selain perbedaan obyek penelitian, perbedaan dalam penelitian ini juga terletak pada variabel, penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang terdiri dari moralitas, gender, kecenderungan kecurangan akuntansi dan yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan *money ethic* sebagai variabel intervening.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moralitas berpengaruh terhadap *money ethic* ?
2. Apakah *gender* berpengaruh terhadap *money ethic* ?
3. Apakah moralitas berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ?
4. Apakah *gender* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ?
5. Apakah *money ethic* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ?
6. Apakah *money ethic* merupakan variabel intervening hubungan moralitas dan *gender* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh moralitas terhadap *money ethic*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap *money ethic*.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
4. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

5. Untuk mengetahui pengaruh *money ethic* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
6. Untuk mengetahui pengaruh moralitas dan *gender* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan *money ethic* sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di dalam instansi pemerintah. Penelitian ini bisa sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi terjadinya kecurangan bagi setiap instansi pemerintah.
2. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan moralitas dan *gender* terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, bahan pembandingan, dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
4. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh moralitas dan *gender* terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.